



LAPORAN KINERJA

2020

Cepat
Efektif &
Efisien
Ramah
Disiplin
Akuntabel
Simpatik



KPKNL JAKARTA IV

MISI KAMI

"Menjadi KPKNL terbaik, terdepan dan terpercaya dalam penyelenggaraan pelayanan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang"

KPKNL JAKARTA IV

- *Memberikan Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara*
- *Memberikan Pelayanan Penilaian*
- *Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang*
- *Memberikan Pelayanan Lelang*



Daftar Isi

BAB I

KATA PENGANTAR - i

RINGKASAN EKSEKUTIF - iii

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPKNL Jakarta IV - 1

B. Peran Strategis KPKNL Jakarta IV - 3

C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja - 5

D. Sistematika Laporan - 6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis - 7

B. Penetapan Kinerja - 9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi - 18

B. Realisasi Anggaran - 28

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum - 32

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang - 32

Lampiran

• Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Jakarta IV Tahun 2020

• Formulir Pengukuran Kinerja

PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai tindak lanjut nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, nomor ND-109/KN.1/2021 tanggal 10 Januari 2021 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2020, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Jakarta IV pada Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Jakarta IV dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2020. Oleh karena itu pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta IV Tahun 2020 sebesar 100,62%. Hasil tersebut merupakan capaian kinerja KPKNL Jakarta IV sesuai dengan Peta Strategis KPKNL Jakarta IV Tahun 2020.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2020 ini kami harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Jakarta IV. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus menuju kesempurnaan. Dengan semangat kerja cerdas dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat kita selesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh pegawai KPKNL Jakarta IV yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Jakarta IV,

Karman

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2020 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis dalam Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN 2020-2024.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Jakarta IV mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta IV mempunyai fungsi: (1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; (2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; (3) registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; (4) penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; (5) pelaksanaan pelayanan penilaian; (6) pelaksanaan pelayanan lelang; (7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; (8) pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang; (9) pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain; (10) pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang; (11) inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan; (12) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; (13) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; (14) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, visi dan misi KPKNL Jakarta IV sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. DJKN mempunyai visi **“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi DJKN, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta IV adalah sejalan dan menyesuaikan dengan tujuan DJKN, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap IKU yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta IV. Sesuai dengan Peta Strategis KPKNL Jakarta IV Tahun 2020, telah ditetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis yang merupakan Kontrak Kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2020.

Sasaran strategis satu yaitu Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal yang terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu: (1) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dengan realisasi IKU tahun 2019 sebesar 120%, sedangkan target

untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp32,467,222,390.48 dengan presentase 100%. IKU ini berasal dari penerimaan PNBP dari Aset, PNBP dari Piutang Negara dan PNBP Lelang. (2) Tingkat penurunan outstanding piutang negara dengan target pada tahun 2020 sebesar 3% dengan nilai Rp4.354.684.238.070,16. (3) Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dengan target untuk tahun 2020 sebesar 100%.

Sasaran strategis dua adalah Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien terdapat 1 (satu) IKU yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan. Adapun realisasi IKU tahun 2019 sebesar 4,7 (skala 5). Sedangkan target untuk tahun 2020 sebesar 4,87 (skala 5).

Sasaran strategis tiga yaitu Pengelolaan Lelang yang Optimal. Terdapat 1 (satu) IKU yaitu Persentase hasil lelang (pokok lelang) dengan target untuk tahun 2020 sebesar 100% atau dengan nilai Rp486.650.000.000,00.

Sasaran strategis empat yaitu Manajemen Pelayanan yang Berkualitas yang terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang. Realisasi IKU ini pada tahun 2019 sebesar 99,02 dari target 85. Sedangkan untuk target tahun 2020 adalah sebesar 88.

Sasaran strategis lima yaitu Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif yang terdiri dari 4 (empat) IKU yaitu (1) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dengan target IKU tahun 2020 adalah 100%. Namun karena adanya Bencana Non-Alam *Novel Coronavirus Disease*, IKU ini dikoreksi dengan target 0%. (2) Persentase efektivitas penyelesaian BKPN dengan target di tahun 2020 sebesar 100% atau dengan nilai 3000 BKPN. (3) Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi dengan target di tahun 2020 sebesar 100% atau dengan nilai Rp8,905,758,176,813. (4) Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) dengan target di tahun 2020 sebesar 100%.

Sasaran strategis enam yaitu Penilaian yang Berkualitas terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu Deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan target tahun 2020 kurang dari 30%.

Sasaran strategis tujuh yaitu Tata Kelola Lelang yang Efektif, terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu: (1) Persentase Produktivitas lelang dengan target tahun 2020 sebesar 34% dari total pelaksanaan lelang. (2) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction dengan target tahun 2020 sebesar 100% dari total pelaksanaan lelang.

Sasaran strategis delapan yaitu Edukasi yang Efektif. Terdapat 1 (satu) IKU pada sasaran strategis ini yaitu Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi. Adapun realisasi IKU dimaksud untuk tahun 2019 dengan indeks sebesar 94,08. Sedangkan target untuk tahun 2020 dengan indeks sebesar 95.

Sasaran strategis sembilan adalah Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif. Pada Tahun 2020, sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu (1) Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset dengan target 80%. (2) Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN dengan target sebesar 100%.

Sasaran strategis sepuluh adalah SDM yang Kompeten, terdapat 1 (satu) IKU yaitu Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan target tahun 2020 sebesar 75%.

Sasaran strategis sebelas adalah Organisasi yang *Fit for Purpose*, terdapat 2 (dua) IKU didalamnya yaitu: (1) Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC dengan target tahun 2020 sebesar 70. (2) Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai dengan target tahun 2020 sebesar 80.

Sasaran strategis dua belas adalah Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal yang terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target 95%. Pada Tahun 2019 realisasi sebesar 98,89% dan target tahun 2019 sebesar 95%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

- m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur Organisasi KPKNL Jakarta IV terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Pelayanan Penilaian;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Pelayanan Lelang;
- f. Seksi Hukum dan Informasi;
- g. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta IV didukung oleh sumber daya manusia dalam berbagai bidang dan keahlian. Jumlah pegawai KPKNL Jakarta IV pada 31 Desember 2020 adalah sebanyak 49 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

I. Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total Pegawai
		I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	0
2.	SLTP	-	-	-	-	0
3.	SLTA	-	0	5	-	5
4.	DI/DII	-	3	1	-	4
5.	DIII	-	9	4	-	13
6.	DIV/Sarjana	-	0	20	0	20
7.	Pasca Sarjana/Master	-	-	3	4	7
8.	Doktor/S3	-	-	-	-	0
TOTAL		0	12	33	4	49

II. Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	0	10	1	0	11
31-40	0	2	16	0	18
41-50	0	0	9	3	12
diatas 50	0	0	7	1	8

Jumlah	0	12	33	4	49
--------	---	----	----	---	----

III. Tenaga Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1.	Juru Sita	5
2.	Pemeriksa	2
3.	Pejabat Lelang	5
4.	Pelelang (Jabfung)	2
5.	Penilai Kekayaan Negara	6
6.	Penilai (Jabfung)	4
TOTAL		24

B. Peran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta IV memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan kekayaan negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Jakarta IV turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, KPKNL Jakarta IV selaku *asset manager* yang efektif dan produktif mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu

indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara, setelah itu dilakukan inventarisasi menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi, dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN.

c. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang berasal dari BLU dan instansi pemerintah.

d. Pelayanan lelang

Berlakunya PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Penawaran lelang melalui elektronik (*email*) dan internet (*e-auction*) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang. *E-auction* dapat dilaksanakan untuk semua jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. *E-auction* merupakan aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui *browser* pada alamat www.lelang.go.id.

Selain dengan komputer atau laptop, aplikasi juga dapat diakses melalui telepon pintar berbasis android. Dengan penggunaan media internet, peserta lelang dapat mengikuti lelang internet dari dan dimanapun berada serta tidak perlu hadir di tempat pelaksanaan lelang. Hal ini tentu saja semakin memudahkan siapa saja untuk ikut menjadi peserta lelang.

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN

Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

Pada pelaksanaan kegiatan, secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 telah sesuai dengan yang ditargetkan dan banyak diantaranya mencapai nilai di atas 100% walaupun terdapat beberapa pencapaian yang tidak melampaui target. Meski semua sasaran strategis mencapai target, namun terdapat beberapa persoalan/permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dimaksud antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan/atau belum memenuhi standar *hard competency* untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di KPKNL Jakarta IV;
2. Pengguna barang (K/L) belum sepenuhnya disiplin dalam penatausahaan dan pengelolaan aset tetap seperti kesadaran untuk melakukan rekonsiliasi barang, kesadaran penyerahan aset idle kepada pengelola barang, dan pemanfaatan aset sesuai ketentuan;
3. Masih terdapat BMN bermasalah yang meliputi BMN belum memiliki dokumen kepemilikan, BMN dikuasai pihak lain, BMN dalam sengketa, BMN belum ditemukan dan BMN rusak berat tetapi belum dihapuskan. Hal tersebut dapat menghambat penetapan utilisasi kekayaan negara;
4. Terdapat aset kredit yang diserahkan ke PUPN memiliki kualitas rendah dan nilai jaminan tidak mencukup untuk menjamin hutang, aset kredit yang memiliki permasalahan hukum, dan aset yang dokumennya kurang lengkap, sehingga sulit untuk dicapai *recovery*-nya;
5. Persepsi masyarakat terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang dapat menghasilkan harga yang optimal belum merata di seluruh lapisan masyarakat serta masih banyak gugatan/ perlawanan/keberatan terhadap pelaksanaan lelang hak tanggungan, fidusia dan kepailitan sebagai penyelesaian dari kredit macet.

D. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV sebagaimana yang ditetapkan, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta IV selama tahun 2020 yang akan kami uraikan dalam Bab III Laporan ini.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV tahun 2020 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Jakarta IV di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Didalam renstra 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Untuk melaksanakan hal tersebut, ditetapkan juga Keputusan Kepala KPKNL Jakarta IV tentang Rencana Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Tahun 2020-2024. Visi dan misi KPKNL Jakarta IV sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN adalah “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Jakarta IV sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta IV yaitu :

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan tersebut, KPKNL Jakarta IV telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai KPKNL Jakarta IV, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal.
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberi manfaat ekonomi, sosial dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai Tujuan Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta IV melaksanakan program yaitu:

- Sosialisasi peraturan tentang pengelolaan BMN dan lelang kepada seluruh Satuan Kerja binaan KPKNL Jakarta IV;

- Melaksanakan e-rekon dengan satuan kerja terkait rekonsiliasi BMN yang dilakukan secara sistem;
- Peningkatan penagihan piutang negara secara intensif;
- Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman/persepsi masyarakat terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
- Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan berpedoman pada SOP (khususnya terhadap SOP Layanan Unggulan);
- *Morning Call*, yang dilaksanakan secara periodik untuk pegawai KPKNL Jakarta IV;
- Usulan Pegawai KPKNL Jakarta IV untuk mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
- Membuat berbagai sistem aplikasi guna memudahkan tugas dan meningkatkan kinerja pegawai di KPKNL Jakarta IV.

B. Penetapan Kinerja

Penerapan *Balance Score Card* (BSC) di lingkungan KPKNL Jakarta IV dilengkapi dengan penetapan sasaran strategis utama *strategic outcome* pada tahun 2020 termasuk 20 IKU. Adapun rincian penjelasan dari masing-masing sasaran strategis termasuk indikator kinerja utama, dan realisasi tahun sebelumnya, serta target 2020 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG OPTIMAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020
1. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	120% atau	100%
2. Tingkat penurunan outstanding piutang negara	%	*N/A	3%
3. Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.	%	*N/A	100%
SASARAN STRATEGIS 2 BIROKRASI DAN LAYANAN PUBLIK YANG AGILE, EFEKTIF DAN EFISIEN			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020
1. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	Indeks	4,7	4,87 (skala 5)

SASARAN STRATEGIS 3 PENGELOLAAN LELANG YANG OPTIMAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020
1. Persentase hasil lelang (pokok lelang)	Indeks	81,74%	100%
SASARAN STRATEGIS 4 MANAJEMEN PELAYANAN YANG BERKUALITAS			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020
1. Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	Indeks	99,02	88 (skala 100)
SASARAN STRATEGIS 5 TATA KELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020
1. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	%	100%	*N/A
2. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	%	103,33%	100%
3. Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi,	%	1280,80%	100%
4. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	N/A	100%
SASARAN STRATEGIS 6 PENILAIAN YANG BERKUALITAS			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020
1. Deviasi ketergunaan hasil penilaian	%	*N/A	30%
SASARAN STRATEGIS 7 TATA KELOLA LELANG YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020
1. Persentase Produktivitas lelang	%	97,88%	34%
2. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	%	97,88%	90%
SASARAN STRATEGIS 8 EDUKASI YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020
1. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	Indeks	94,08	95 (skala 100)

SASARAN STRATEGIS 9 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020
1. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	%	73%	80%
2. persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	%	*N/A	100%

SASARAN STRATEGIS 10 SDM YANG KOMPETEN			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020
1. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	94%	100%

SASARAN STRATEGIS 11 ORGANISASI YANG FIT-FOR-PURPOSE			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020
1. Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	Indeks	*N/A	70
2. Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	Indeks	*N/A	80

SASARAN STRATEGIS 12 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN YANG OPTIMAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2019	Target 2020
1. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	98,89%	95%

Ket:

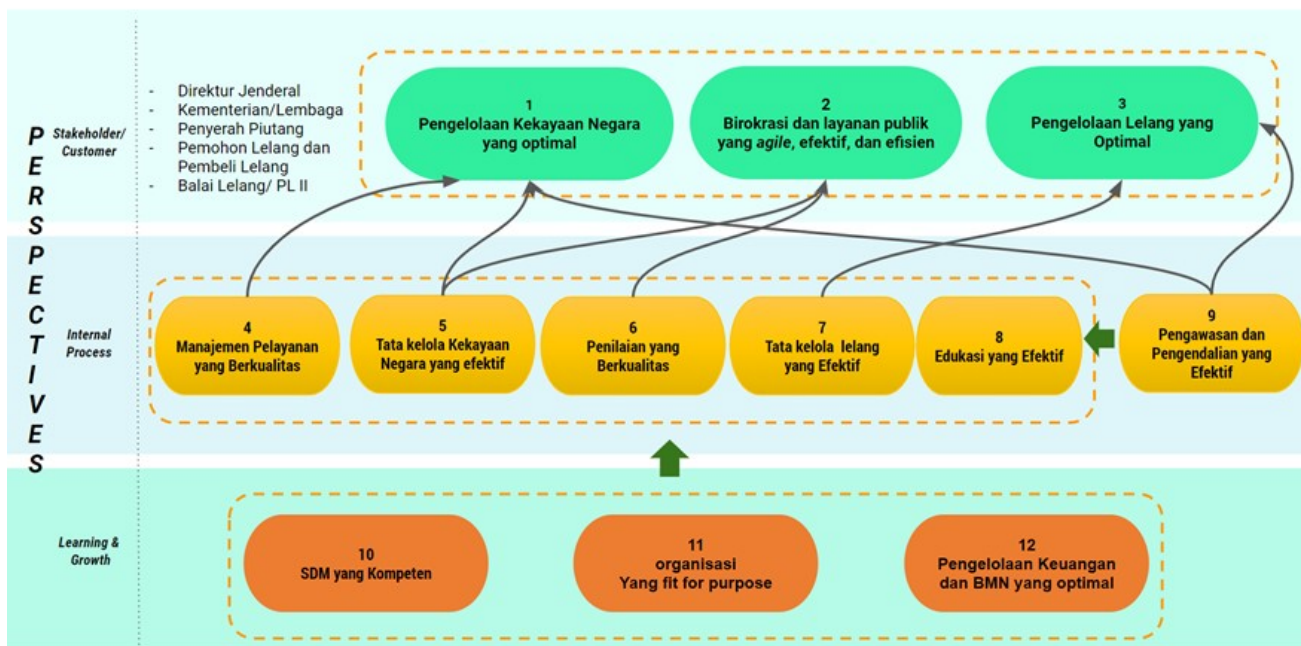
* N/A = tidak tersedia, penjelasan akan disajikan dalam uraian sasaran strategis

Untuk menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain :

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan.
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan nonfinansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang.

- memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu-*three* Tahun 2020 sebagai berikut:



Peta strategi Kemenkeu-*three* Tahun 2020 mempunyai 3 perspektif, yaitu: *stakeholders/ customer perspective*, *strategic driver (internal process perspective)*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 12 sasaran strategis (SS) dan 20 indikator kinerja utama (IKU) dengan peta strategis sebagai berikut:

- Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.

Sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang optimal terdapat 3 (tiga) IKU yaitu: (1) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang; (2) tingkat penurunan outstanding piutang negara, dan (3) persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari

penerimaan dan hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga, penerimaan Biaya Administrasi dari pengurusan Piutang Negara dan penerimaan bea lelang ataupun hasil lelang dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta IV. IKU ini pada tahun 2020 ditargetkan 100% atau sebesar Rp32.467.222.390,48

Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang secara optimal ditujukan untuk pengembalian (*recovery*) piutang negara yang tinggi ke negara dan pelaksanaan lelang yang mendorong terjualnya barang yang dilelang dengan harga yang tinggi. Pelayanan yang optimal akan berdampak pada sisi penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang dari proses pelayanan lelang.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Hasil dari pengurusan piutang negara antara lain berupa Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan Biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara.

2. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah ukuran untuk mengetahui apresiasi masyarakat khususnya pengguna jasa di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang atas pelayanan yang diberikan oleh KPKNL. Semakin baik pelayanan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Sasaran strategis Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien terdapat 1 (satu) IKU yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan. Adapun target IKU tahun 2020 sebesar 4,73, sedangkan IKU ini pada tahun 2019 masuk dalam sasaran strategis pelayanan publik yang prima dengan realisasi sebesar 4,7.

3. Pengelolaan lelang yang optimal

Lelang merupakan penjualan yang dilakukan secara terbuka untuk umum yang didahului dengan adanya pengumuman lelang. Pelayanan lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari terwujudnya harga transaksi lelang yang kompetitif serta meningkatnya kontribusi bagi penerimaan negara. Sasaran Strategis Pengelolaan lelang yang optimal terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu Persentase hasil lelang (pokok lelang) yang dihitung dengan 2 komponen perhitungan yaitu: Target/Realisasi pokok lelang kelas I dengan target tahun 2020 sebesar Rp335.000.000.000,00 dan komponen lainnya yaitu target/realisasi pokok lelang pegadaian sebesar Rp151.650.000.000,00. Pada Tahun 2019, realisasi pokok lelang kelas I adalah sebesar Rp.257.429.711.964,00 dan pokok lelang pegadaian sebesar Rp.140.138.852.300,00 dengan capaian IKU tahun 2019 adalah 81,74%

4. Manajemen pelayanan yang berkualitas

Sasaran strategis ini mempunyai IKU nama Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara dan Lelang. IKU ini merupakan laporan pengoptimalan penyelesaian rincian hasil lelang setelah lelang dilaksanakan. Adapun target untuk tahun 2020 sebesar 88, sedangkan realisasi IKU tahun 2019 sebesar 99,02 % dari target sebesar 85.

5. Tata kelola kekayaan negara yang efektif

Sasaran Strategis Tata kelola kekayaan negara yang efektif terdiri dari 4 (empat) IKU yaitu Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan, persentase efektivitas penyelesaian BKPN, persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi, dan persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Pada sasaran strategis dengan IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan, Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN pada tahun ini direvisi menjadi tidak ada.

Pada IKU persentase efektivitas penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) selesai, BKPN selesai dihitung dari jumlah BKPN yang Lunas, Ditarik, PSBDT, Dikembalikan. Target BKPN Selesai tahun 2020 sebanyak 3000 BKPN dimana realisasi tahun 2019 sebanyak 2.966 BKPN dengan persentase 102,10% dari target 2.905 BKPN.

Utilisasi Kekayaan Negara adalah peningkatan daya guna kekayaan negara melalui:

- a. Penetapan status penggunaan atas kekayaan negara yang belum digunakan secara optimal;
- b. Pemanfaatan melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah; serta
- c. Pemindahtanganan melalui tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah.

Kekayaan negara yang diutilisasi berasal dari BMN maupun kekayaan negara lain-lain yang belum digunakan secara optimal dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengguna barang. Persentase Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi dengan target pada tahun 2020 sebesar 100% dengan nilai sebesar Rp8,905,758,176,813,00. Pada tahun 2019, realisasi IKU ini sebesar 1280,80% dengan nilai Rp2.094.000.000.000,00.

Portofolio Aset adalah evaluasi kinerja BMN yang merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Capaian portofolio aset diperoleh dari Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya /jumlah target aset yang akan dievaluasi. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dengan target pada tahun 2020 sebesar 100%.

6. Penilaian yang berkualitas

Realisasi ini adalah rata-rata deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2020. Deviasi terjadi karena nilai yang digunakan dalam persetujuan lebih besar dari hasil penilaian. Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan target pada tahun 2020 lebih kecil dari 30%.

7. Tata kelola lelang yang efektif

Untuk menunjang pencapaian kinerja, dibutuhkan sistem informasi dan perangkat dukungan teknologi yang memadai. Sistem informasi yang dimaksud adalah sistem informasi yang andal dan terintegrasi sehingga memudahkan *sharing* dan *retrieve data* serta memperlancar proses kerja. Integrasi TIK adalah penyatuan berbagai sistem TIK ke dalam satu sistem DC (*Data Center*) - DRC (*Data Recovery Center*). Selain itu, sistem informasi yang andal juga ditandai dengan penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau *Business Impact Analysis* (BIA).

Guna mendapatkan peminat lelang sebanyak-banyaknya dan untuk membentuk harga lelang yang optimal, perlu dilakukan publikasi/penyampaian informasi rencana pelaksanaan lelang secara lebih efektif dan efisien. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet, intensitas publikasi/penyampaian informasi rencana pelaksanaan lelang berbasis TIK perlu ditingkatkan.

Sasaran strategis tata kelola lelang yang efektif terdapat 2 (dua) IKU, yaitu Persentase Produktivitas e-auction dengan target tahun 2020 sebesar 34% sedangkan realisasi produktivitas lelang tahun 2019 adalah 53,18%. Untuk IKU persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 90%.

8. Edukasi yang efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut: 1). edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan 2). edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum. Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Sasaran Strategis Edukasi yang efektif ini terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi. Target tahun 2020 sebesar 95, adapun realisasi tahun 2019 dengan indeks sebesar 94,08.

9. Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Pengawasan dan pengendalian yang efektif adalah serangkaian kegiatan untuk memantau, memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan maupun laporan, menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan menghasilkan output yang optimal. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi pelaksanaan pekerjaan, kendala/permasalahan yang terjadi yang kemudian dilaporkan sebagai bahan perbaikan untuk periode selanjutnya.

Sasaran strategis pengawasan dan pengendalian yang efektif terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset dan persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang. Target IKU ini pada tahun 2020 sebesar 80%.

Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN merupakan usaha untuk menyelesaikan sisa aset objek penilaian kembali BMN yang sudah ditindak lanjuti yaitu obyek BMN kategori K1 yang diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2020. Target IKU ini pada tahun 2020 sebesar 100%.

10. SDM yang kompeten

Upaya KPKNL dalam membentuk SDM dilakukan dengan tertata dan berkelanjutan sehingga menghasilkan SDM yang berkompentensi tinggi. Pegawai yang memenuhi *hard competency* ditunjukkan dengan kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi pegawai yang dimiliki. Kompetensi pegawai salah satunya ditunjukkan dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pernah diikuti. Pendidikan dan pelatihan (diklat) tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/ DIV, atau gelar akademik lainnya, maupun pendidikan non-gelar yang meliputi diklat substansif dasar (DTSD), diklat substansif spesialisasi, *internship/on the job training, workshop*, bimbingan teknis, dan juga *in-house training* terkait bidang teknis. Sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan realisasi tahun 2019 sebesar 94% Sedangkan target tahun 2020 sebesar 100%.

11. Organisasi yang *fit for purpose*

Reviu Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan kontrak kinerja, edukasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi. Proses penilaian pada KPKNL dilakukan oleh kantor wilayah. Tujuan dari sasaran strategi ini untuk mengetahui perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU didalamnya yaitu: (1) Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC dengan target tahun 2020 sebesar 70, adapun realisasi pada tahun 2019 adalah 91,67 dan (2) Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai dengan target tahun 2020 adalah 80.

12. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan belanja. Anggaran adalah salah satu sumber daya dalam organisasi. Pengelolaan anggaran yang optimal adalah penggunaan anggaran untuk mendorong organisasi mencapai hasil kinerja yang maksimal.

Sasaran strategis pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target tahun 2020 sebesar 95%, adapun realisasi tahun 2019 sebesar 98,89%.

Selanjutnya, pembahasan Akuntabilitas Kinerja dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2020, terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV Tahun 2020 telah memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta IV sebesar 100,62.

Adapun rincian capaian kinerja atas 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Jakarta IV Tahun 2020 dapat dijelaskan sesuai tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis		IKU		Target	Realisasi	% (Indeks batas Maks)
SS 1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	1.1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	129,11%	120%
		1.2	tingkat penurunan outstanding piutang negara	3%	0,18%	6,09%
		1.3	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	100%	100%	100%
SS 2	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan	4,73 (Skala 5)	4,87	102,96%
SS 3	Pengelolaan lelang yang optimal	3.1	Persentase hasil lelang (pokok lelang)	100%	76,07%	76,07%
SS 4	Manajemen pelayanan yang berkualitas	4.1	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	88 (Skala 100)	99,69	113,28%
SS 5	Tata kelola kekayaan negara yang efektif	5.1	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	-	-	-

Sasaran Strategis		IKU		Target	Realisasi	% (Indeks batas Maks)
		5.2	persentase efektivitas penyelesaian BKNP	100%	101,02%	101,02%
		5.3	persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%	205,06%	120%
		5.4	persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	100%	100%
SS 6	Penilaian yang berkualitas	6.1	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	0,94%	120%
SS.7	Tata kelola lelang yang efektif	7.1	Persentase Produktivitas lelang	34%	49,26%	120%
		7.2	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%	100%	111,11%
SS 8	Edukasi yang efektif	8.1	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	95 (Skala 100)	98,17	103,33%
SS 9	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	9.1	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%	85,14%	106,42%
		9.2	persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%	99,13%	99,13%
SS 10	SDM yang Kompeten	10.1	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
SS 11	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	11.1	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	70 (Skala 100)	98,80	120%

Sasaran Strategis		IKU		Target	Realisasi	% (Indeks batas Maks)
		11.2	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80 (Skala 100)	92,21	115,26%
SS 12	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	12.1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95,66%	100,69%

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-*Three* Tahun 2020 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Three* Tahun 2020 sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal dengan 2 (dua) IKU, yaitu :**

IKU 1.1: Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan, dan hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga.

Nilai manfaat ekonomi dari kegiatan pengelolaan kekayaan negara diperoleh melalui:

1) PNBP Aset (PNBP Aset)

- a) Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- b) Penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

Target PNBP Aset tahun 2020 sebesar Rp13,506,480,000.00 (Tiga belas miliar lima ratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

2. PNBP Piutang Negara

Penerimaan ini berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku antara lain:

- Pembayaran/pelunasan piutang negara dikenakan biaya administrasi 1% jika pembayaran/pelunasan dilakukan sebelum 6 bulan sejak SP3N terbit atau 10% jika pembayaran/pelunasan dilakukan setelah 6 bulan sejak SP3N terbit.
- Penarikan piutang negara oleh penyerah piutang dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5%.

Target PNBP Piutang Negara tahun 2020 sebesar Rp3,483,747,390.48 (Tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh koma empat puluh delapan rupiah).

3. PNBP Lelang.

Penerimaan ini berasal dari pelayanan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta IV kepada pengguna jasa. PNBP lelang terdiri dari:

- a. bea lelang;
- b. bea lelang pegadaian;
- c. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
- d. biaya permohonan lelang;
- e. penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
- f. pemberian izin operasional Balai Lelang;
- g. pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;
- h. perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II; dan
- i. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Target PNBP Lelang tahun 2020 sebesar Rp15.476,995,000,00 (Lima belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk tahun 2020, pengukuran capaian atas ketiga komponen di atas dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. PNBP Aset sebesar 50%, dengan pertimbangan bahwa optimalisasi aset masih menjadi fokus DJKN untuk beberapa tahun mendatang,
- b. PNBP PN sebesar 20%, dengan pertimbangan adanya penurunan potensi kualitas piutang negara yang dikelola oleh DJKN, dan
- c. PNBP Lelang sebesar 30%, dengan pertimbangan trend transaksi lelang yang senantiasa naik dari tahun ke tahun.

**Tabel Realisasi Penerimaan Bukan Pajak
Per 31 Desember 2020**

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
a. PNBP Aset	13.506.480.000,00	28.249.866.085,00	209,2
b. PNBP Piutang Negara	3.483.747.390,48	996.544.319,10	28,61
c. PNBP Lelang	15.476.995.000,00	12.672.245.448,00	82,00
Realisasi IKU	32,467,222,390.48	41,918,655,852.1	129,11%

Realisasi IKU Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara tercapai 129,11% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

IKU 1.2: Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara

Realisasi Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2020 adalah 0,18% dari target sebesar 3%, dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Target	Realisasi	% Capaian
PSBDT ≤ 2016		2,081,574,231.00	
Pembayaran ≤ 2016		5,873,723,100.31	
Jumlah	4.354.684.238.070,16	7,955,297,331.31	0,18 %

IKU 1.3: Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Realisasi Tingkat Outstanding Piutang Negara Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2020 adalah 100 % dari target sebesar 100%.

2. Sasaran Strategis 2: Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 2.1: Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan

Realisasi Survei Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2020 ditetapkan sebesar 4,87. Capaian ini melebihi dari realisasi tahun 2019 sebesar 4,7 dari target tahun 2019 sebesar 4,64. Selama kurun waktu tahun 2020, KPKNL Jakarta IV tidak pernah menerima keberatan dari pelanggan/pengguna jasa. Pencapaian target sebesar 100 %.

3. **Sasaran Strategis 3: Pengelolaan lelang yang optimal dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu :**

IKU 3.1: Persentase hasil lelang (pokok lelang)

Realisasi persentase hasil lelang (pokok lelang) pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2020 adalah 76.07% dari target sebesar 100%, dengan rincian capaian sebagai berikut.

Pokok Lelang	Target 2020	Realisasi	Capaian
PL Kelas I	335.000.000.000	264,129,273,377	
Pegadaian	151.650.000.000	106,087,209,000	
Jumlah	486.650.000.000	370,216,482,377	76.07%

4. **Sasaran Strategis 4: Manajemen pelayanan yang berkualitas dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu :**

IKU 4.1: Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang

Realisasi Rata-rata persentase layanan unggulan yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 99,69 dari target yang ditetapkan sebanyak 88. Pencapaian target sebesar 113.28%.

5. **Sasaran Strategis 5: Tata kelola kekayaan negara yang efektif dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu :**

IKU 5.1: Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertifikatan BMN berupa Tanah. BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan BMN.

Tujuan penswertifikatan BMN antara lain untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah, dan mengamankan BMN berupa tanah. Ruang lingkup penswertifikatan BMN berupa tanah meliputi: tanah yang belum bersertifikat ataupun tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/lembaga.

Namun IKU ini direvisi pada tengah tahun 2020 dikarenakan Bencana Non-Alam *Novel Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*, menjadi nihil.

IKU 5.2: Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

Realisasi persentase efektivitas penyelesaian BKPN yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 101.02 dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Pencapaian target tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Komponen IKU	Target	Realisasi	Bobot	Capaian IKU
BKPN Kategori I (s.d. 31 Des 2010)		27	1,5	101,02 %
BKPN Kategori II (1 Jan 2011 s.d. 31 Des 2019)		2068	1	
BKPN Kategori III (Tahun 2020)		1844	0,5	
Jumlah BKPN	3000	3939		

IKU 5.3: Persentase Nilai Kekayaan Negara Yang Diutilisasi

Realisasi Nilai Kekayaan Negara Yang Diutilisasi yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 205.60% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Pencapaian target dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Jumlah Target Tahunan	Jumlah Realisasi	%
Pemanfaatan		2,561,532,714,159.20	
Penetapan Status Penggunaan		15,748,733,737,035.00	
Jumlah	8,905,758,176,813	18,310,266,451,194.20	205,60%

IKU 5.4: Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%.

6. **Sasaran Strategis 6: Penilaian yang berkualitas dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu:**

IKU 6.1: Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 0,94% dari target yang ditetapkan sebanyak 30%. Pencapaian target sebesar 120%.

7. **Sasaran Strategis 7: Tata Kelola Lelang Yang Efektif dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu:**

IKU 7.1: Persentase Produktivitas Lelang

Realisasi persentase produktivitas lelang yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebanyak 34% dari frekuensi lelang yang dilakukan di tahun 2020. Realisasi target dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel Realisasi Hasil Lelang
Per 31 Desember 2020**

Keterangan	Frekuensi Lelang	Frekuensi Lelang Laku	% Capaian
Realisasi IKU	406	200	49,26%

IKU 7.2: Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction Dan E-Conventional Auction

Realisasi pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction dicapai pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 90%. Realisasi target dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel Realisasi Persentase produktifitas lelang
Per 31 Desember 2020**

Jenis Lelang	Frekuensi	Jumlah Frekuensi	%
e-Auction	403	406	99.26%
e-Conventional Auction	3		0.74%
Jumlah			100%

8. **Sasaran Strategis 8: Edukasi yang efektif dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu :**

IKU 8.1: Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Realisasi tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2020 tercapai sebesar 98,17 poin dari target yang ditetapkan sebesar 95 poin atau tercapai 103,33%.

9. **Sasaran Strategis 9: Pengawasan dan pengendalian yang efektif dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :**

IKU 9.1: Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Realisasi pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada tahun 2020 tercapai sebesar 98.17 dari target yang ditetapkan sebesar 95 Pencapaian target sebesar 103.33%.

Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2019 yang ditindaklanjuti oleh K/L	94
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L	32
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2019	115
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2020	33
Capaian IKU	85.14%

IKU 9.2

IKU 9.2: Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian/Perbaikan Atas Sisa Aset Objek Penilaian Kembali BMN

Sisa aset objek penilaian kembali BMN yang sudah ditindak lanjuti adalah obyek BMN kategori K1 yang diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan status LHIP Selesai (Status 7) adalah 638 NUP dan status Pengiriman BAR (status 8) adalah 54 NUP dan status BAR Selesai adalah 4931 NUP dari target jumlah NUP untuk KPKNL Jakarta IV adalah sebanyak 5442 NUP.

Realisasi persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN pada tahun 2020 tercapai sebesar 99.13% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian target sebesar 99.13%.

10. **Sasaran Strategis 10: SDM yang kompeten dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu :**

IKU 10.1: Persentase pengembangan kompetensi pegawai.

Realisasi persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2020 tercapai 120% dengan target sebesar 75%. Pencapaian 120% tersebut diperoleh dari seluruh pegawai di seksi teknis KPKNL Jakarta IV yang telah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di BPPK sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi seksi masing-masing yang meliputi seminar, sosialisasi, *internship/on the job training*, *basic training* (DTSD, Semapta), Pembelajaran Jarak Jauh, *workshop*, bimbingan teknis, *sharing session*, dan juga *in-house training*. KPKNL Jakarta IV memberikan kesempatan luas terhadap seluruh pegawainya dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.

11. **Sasaran Strategis 11: Organisasi yang *fit-for-purpose* dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :**

IKU 10.1: Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC

Realisasi nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 98,80 dari target yang ditetapkan sebanyak 70. Pencapaian target sebesar 120%.

IKU 10.2: Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai

Tingkat efektivitas FGD kode etik merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu *delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), *understanding* (pemahaman peserta terhadap materi FGD), *learning enthusiasm* (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), *contribution to learning* (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai).

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang

dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan *Forum Group Discussion*.

Fokus materi FGD yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada triwulan III yaitu Dampak Covid-19 Respon dan Arah Kebijakan Fiskal. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema ditetapkan oleh Setjen.

Realisasi Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 92.21 dari target yang ditetapkan sebanyak 80. Pencapaian target sebesar 115.26%.

12. Sasaran Strategis 12: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 13.1: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Realisasi Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar 95,66%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 95,00% atau tercapai 106,69%.

B. Realisasi Anggaran

Untuk pembiayaan satuan kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV dalam Tahun 2020 telah dialokasikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia dengan jumlah sebesar Rp2.279.655.000,00 tersebut pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp2.230083.468,00 atau sebesar 97,83% dari pagu yang telah ditetapkan. Untuk rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

**Tabel Laporan Pagu Dana Per Jenis Belanja
Berdasarkan Online Monitoring SPAN
Per 31 Desember 2020**

No	PROGRAM	Pagu Dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen (%)
1.	Belanja pegawai	570.145.000,00	570.135.059,00	100
2.	Belanja Barang	1.677.710.000,00	1.628.954.259,00	97,09
3.	Belanja Modal	31.800.000,00	30.994.150,00	97,47
	Jumlah	5.213.177.000,00	5.105.025.882,00	97,83

Pada tahun 2020 ini, perhitungan persentase penyerapan anggaran berbeda dengan tahun 2019. Perhitungan realisasi IKU terdiri dari komponen persentase penyerapan anggaran, persentase keluaran riil, efisiensi, dan konsistensi. Adapun perhitungannya adalah:

$$\text{Persentase IKU} = (\text{IKPA} \times 40\%) + (\text{SMART DJA} \times 60\%)$$

**Tabel IKPA Berdasarkan Online Monitoring SPAN
Per 31 Desember 2020**

No	INDIKATOR IKPA	BOBOT INDIKATOR IKU	NILAI IKPA	NILAI AKHIR IKPA
1.	Pengelolaan UP	8%	100%	8%
2.	Data Kontrak	0%	0%	0%
3.	Kesalahan SPM	5%	100%	5%
4.	Retur SP2D	5%	100%	5%
5.	Hal III DIPA	0%	99,93%	0%
6.	Revisi DIPA	0%	100%	0%
7.	Penyelesaian Tagihan	0%	0%	0%
8.	Konfirmasi Capaian Output	10%	100%	10%
9.	Rekon LPJ	5%	100%	5%
10.	Perencanaan Kas	0%	0	0%
11.	Realisasi	15%	100%	15%
12.	Pagu Minus	5%	100%	5%
13.	Dispensasi SPM	5%	100%	5%
TOTAL		58%		58%
TOTOAL NILAI AKHIR IKPA		100%		

Perhitungan pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran dari komposisi ikpa pada tabel di atas, dapat diperoleh persentase sebesar 100%.

**Tabel SMART DJA Berdasarkan Online Monitoring SPAN
Per 31 Desember 2020**

No	INDIKATOR SMART DJA	NILAI SMART DJA
1.	Penyerapan Anggaran	97,83%
2.	Konsistensi RPD Awal	59,97%
3.	Konsistensi RPD Akhir	99,82%
4.	Capaian Keluaran Kegiatan	90,32%
5.	Efisiensi	11,53%
TOTAL NILAI SMART DJA		89,49%

1. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran, pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dengan cara membandingkan akumulasi realisasi anggaran Satuan Kerja dengan akumulasi pagu anggaran, sebagaimana berikut:

Keterangan:

P : Penyerapan Anggaran

RA : Akumulasi realisasi anggaran Satuan Kerja

PA : Akumulasi pagu anggaran Satuan Kerja

2. Konsistensi

Pengukuran Konsistensi (PK) antara perencanaan dan implementasi pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan setiap bulan, dengan membandingkan jumlah hasil perbandingan akumulasi realisasi anggaran bulanan Satuan Kerja, dengan akumulasi Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan Satuan Kerja, dengan jumlah bulan. Sebagaimana berikut:

Keterangan:

K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

RA : Realisasi Anggaran

RPD : Rencana Penarikan Dana pada DIPA Satuan Kerja

n : Jumlah Bulan

3. Capaian Keluaran

Pengukuran Pencapaian keluaran (output) pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata dari perkalian, antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran (output), dengan rata-rata perbandingan antara realisasi dan target Indikator Kinerja Keluaran dan jika Indikator Kinerja Keluaran belum tersedia pada Satuan Kerja, maka dapat menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. Sebagaimana berikut:

Keterangan :

PK = Pencapaian Keluaran

RVK = Realisasi Volume Keluaran

TVK = Target Volume Keluaran

RKKi = Realisasi Indikator Kinerja Keluaran ke i

TKKi = Target Indikator Kinerja Keluaran ke i

m = Jumlah Indikator Kinerja Keluaran n = Jumlah Jenis Keluaran

4. Efisiensi

Pengukuran Efisiensi pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran (output) yang diperoleh, dengan mengurangi angka (satu) pada hasil perbandingan realisasi anggaran per keluaran (output) dengan pagu anggaran per keluaran (output), sebagaimana berikut:

Keterangan :

E = Efisiensi

RAK = Realisasi Anggaran per Keluaran (Output)

PAK = Pagu Anggaran per Keluaran (Output)

RVK = Realisasi Volume Keluaran (Output)

TVK = Target Volume Keluaran (Output)

n = Jumlah Jenis Keluaran

**Tabel Perhitungan IKU
Per 31 Desember 2020**

No	INDIKATOR SMART DJA			NILAI TOTAL IKU
1.	IKPA	100%	40%	40%
2.	SMART DJA	89,49%	60%	53,69%
TOTAL NILAI IKU				93,69%

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV tahun 2020 yang telah disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Jakarta IV sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan kerja untuk mengetahui apakah kinerja yang telah dilaksanakan sudah mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan karena capaian yang hendak dicapai telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Jakarta IV telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian, KPKNL Jakarta IV senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan optimal. Hal ini tercermin dari pencapaian IKU pada tahun 2020 yang cukup memuaskan dan secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jakarta IV mencapai 100.62%.

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Jakarta IV mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan persepsi masyarakat dan *stakeholder* lelang melalui sosialisasi untuk mendorong pemahaman terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
2. Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi data hutang dengan penanggung hutang dalam rangka peningkatan kualitas data dalam upaya menunjang penyelesaian piutang negara serta percepatan pengurusan Piutang Negara;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan latihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah dijadwalkan dalam rangka mengatasi beban kerja yang ada dan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2020, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan di Kementerian Keuangan sebagai bahan acuan pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan rencana strategis maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV. Laporan Kinerja tahun 2020 kiranya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPKNL Jakarta IV pada periode berikutnya.